

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PEMBINAAN KELOMPOK TANI SAYURAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

Muhammad Sumanto Saputra
NPP. 32.1026

Asdaf Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: muhammadsumantosaputra@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mulyana, S.E., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The population of South Halmahera Regency continues to grow every year, resulting in an increasing market demand for food commodities, particularly vegetables. This growth has led to unmet food needs and insufficient food stock, requiring supplies to be brought in from outside the region. As a result, the region's food security index dropped significantly in 2023. Ironically, South Halmahera Regency has a considerable number of farmers. **Purpose:** This study aims to identify, describe, and analyze the efforts to overcome the inhibiting factors in the implementation of food security policies through the development of vegetable farmer groups in South Halmahera Regency, North Maluku Province. **Method:** This study employs Charles O. Jones' Policy Implementation theory and uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. After data is collected, it is analyzed through data reduction, data display, and data verification or conclusion drawing. **Result:** The results of this study indicate that the implementation of food security policy through the development of farmer groups has been carried out by the government; however, it has not proceeded as expected. **Conclusion:** The study shows that the implementation of food security policy through farmer group development has indeed been undertaken by the government, but it has not been fully effective. Several obstacles remain across organizational, interpretative, and practical dimensions, including limited budget or operational costs, an insufficient number of agricultural extension officers, restricted land availability, and unpredictable weather conditions. Furthermore, communication with farmers remains a challenge, as many still adhere to traditional mindsets. They have not yet adapted to horticultural farming and prefer spice farming due to its relatively easier maintenance. Efforts made include the government's continued commitment to providing intensive guidance to farmer groups by encouraging farmers to increase agricultural production in order to meet food demands.

Keywords: Policy Implementation, Food Security, Farmer Group Development, Horticulture.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan dari tahun ke tahun yang terus meningkat menyebabkan tingginya permintaan pasar akan komoditas pangan terutama sayuran sehingga kebutuhan pangan menjadi tidak terpenuhi dan ketersediaan stok pangan harus didatangkan dari luar daerah yang berdampak pada penurunan nilai ketahanan pangan yang drastis Tahun 2023, tetapi nyatanya Kabupaten Halmahera Selatan memiliki jumlah petani yang signifikan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pembinaan kelompok tani sayuran

di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Charles O. Jones dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan langkah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya setelah data terkumpul, data dianalisis dengan cara reduksi data, *display* data (penyajian data), dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan dari data. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan melalui pembinaan kelompok tani telah dilaksanakan pemerintah hanya saja belum berjalan sesuai apa yang diharapkan. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan melalui pembinaan kelompok tani telah dilaksanakan pemerintah namun belum berjalan sesuai apa yang diharapkan. Masih terdapat beberapa hambatan baik dari dimensi organisasi, interpretasi, dan penerapan yaitu keterbatasan anggaran atau biaya operasional, kurangnya jumlah penyuluh, keterbatasan lahan, dan cuaca tidak menentu, serta komunikasi dengan petani masih mengalami hambatan dimana petani masih berpola pikir tradisional petani belum bisa menyesuaikan pertanian hortikultura dan lebih memilih pertanian rempah-rempah karena perawatan lebih yang mudah. Upaya yang dilakukan yaitu pemerintah terus berupaya melakukan pembinaan intensif pada kelompok tani dengan mendorong petani meningkatkan produksi pertanian agar kebutuhan pangan tercukupi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ketahanan Pangan, Pembinaan Kelompok Tani, Holtikultura.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan pangan yang berkelanjutan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, terutama dalam konteks otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan kebijakan ketahanan pangan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan individu, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, atau budaya masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Studi sebelumnya oleh Rahmi & Jumiati (2020) Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, menemukan kendala pada sumber daya dan karakteristik lembaga, faktor pendukung: gudang pangan dan anggaran.

Ketahanan Pangan menjadi isu krusial di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai kabupaten dengan populasi terbesar di Maluku Utara yang mencapai 252,864 jiwa pada Tahun 2023 (BPS Maluku Utara, 2023). Data distribusi penduduk tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Selatan memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar dalam menjamin ketahanan pangan dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara. Dengan populasi mencapai 252,864 jiwa atau sekitar 18% dari total penduduk Maluku Utara, tekanan terhadap kebutuhan pangan di kabupaten ini jauh lebih tinggi. Kondisi geografis kepulauan dengan 8 kecamatan yang tersebar di berbagai pulau semakin menambah kompleksitas dalam distribusi dan pemenuhan kebutuhan pangan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan permintaan pasar terhadap komoditas pangan khususnya sayuran semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tren Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Halmahera Selatan yang mengalami fluktuasi dalam lima tahun

terakhir Tren IKP menunjukkan pola yang memprihatinkan dimana setelah mencapai peningkatan konsisten dari Tahun 2018-2021, terjadi penurunan tajam sebesar 5.04 poin pada Tahun 2022 dan berlanjut menurun 0.81 poin di Tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya permasalahan sistemik dalam pengelolaan ketahanan pangan di kabupaten ini. Jika dibandingkan dengan standar nasional dimana IKP minimal yang diharapkan adalah 85.00, maka capaian Kabupaten Halmahera Selatan saat ini (79.82) berada jauh di bawah target. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat posisinya sebagai kabupaten dengan populasi terbesar di provinsi Maluku Utara.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat posisi strategis Kabupaten Halmahera Selatan sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Maluku Utara yang mencapai 252,864 jiwa. Penurunan drastis nilai IKP dari 85,67 pada Tahun 2021 menjadi 80,63 pada Tahun 2022 dan terus menurun menjadi 79,82 pada Tahun 2023 mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam sistem ketahanan pangan kabupaten ini. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat berdampak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, mengingat rata-rata pemenuhan kebutuhan pangan hortikultura dari produksi lokal hanya mencapai 74%, sementara 26% sisanya masih harus dipenuhi dari luar daerah.

Pembinaan kelompok tani hortikultura sayuran dipilih sebagai fokus penelitian karena sektor ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan, mengingat Kabupaten Halmahera Selatan memiliki lahan pertanian potensial seluas 1,245 hektar yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah secara optimal untuk pertanian hortikultura terutama sayuran. persebaran kelompok tani yang tidak merata antar kecamatan mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap pembinaan dan pengembangan pertanian. Salah satu sektor pertanian yang saat ini berkembang di Kabupaten Halmahera Selatan adalah hortikultura, khususnya budidaya sayuran. Namun, mayoritas petani memiliki lahan dengan luas terbatas, sehingga skala usaha mereka cenderung kecil. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan kelompok tani baru serta penguatan kelompok tani yang sudah ada guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam usaha hortikultura. Kelompok tani hortikultura sendiri berperan sebagai elemen kunci dalam keberhasilan pengembangan sektor ini.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan hortikultura, termasuk budidaya sayuran, cabai, dan tomat. Kabupaten Halmahera Selatan menjadi salah satu daerah yang aktif dalam pembinaan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan. Penyuluhan serta pembinaan bagi kelompok tani dan pelaku usaha pertanian bertujuan memperkenalkan teknologi terbaru serta metode pertanian yang lebih efisien dan efektif. Kegiatan ini dijalankan melalui program kerja tahunan yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan wawasan kelompok tani agar mampu mengelola usaha pertaniannya secara lebih optimal. Pembinaan tersebut diharapkan petani dapat menghasilkan hasil pangan yang lebih baik untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Penulis memfokuskan pada pembinaan kelompok tani hortikultura sayuran, karena kegentingan kebutuhan pangan yang sering dihasilkan dari luar kabupaten Halmahera Selatan dan sesuai situasi geografis Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan potensi besar saat ini, mengingat Kabupaten Halmahera Selatan memiliki lahan pertanian potensial seluas 1,245 hektar yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah secara optimal untuk pertanian hortikultura terutama sayuran.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan studi literatur dan penelitian sebelumnya yang telah dikaji dalam skripsi ini, penulis mengidentifikasi adanya kesenjangan (gap) dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, khususnya pada aspek pembinaan kelompok tani hortikultura di daerah se Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek kesejahteraan masyarakat secara umum (misalnya Rahmi & Jumiati, 2020) atau pemberdayaan petani dalam konteks daratan dengan infrastruktur yang relatif memadai (misalnya Saheb et al., 2020 di Boyolali). Sementara itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi pembinaan kelompok tani sayuran di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan logistik yang menantang. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu belum menggali secara mendalam bagaimana rendahnya pemanfaatan lahan potensial hortikultura, fluktuasi Indeks Ketahanan Pangan (IKP), serta rendahnya keterlibatan dan partisipasi petani dalam program pembinaan turut mempengaruhi pengimplementasian kebijakan (Nuryanti, Sri & Dewa K.S. Swastika 2016). Hal ini menjadi celah ilmiah yang ingin diisi oleh penelitian ini, khususnya dengan fokus pada efektivitas pembinaan kelompok tani hortikultura dalam konteks daerah yang memiliki potensi pertanian namun belum dimaksimalkan secara optimal, serta bagaimana kondisi faktual implementasi kebijakan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan operasional, dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) dalam memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan model implementasi kebijakan ketahanan pangan berbasis pembinaan kelompok tani di wilayah kepulauan Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis data empiris yang relevan bagi perbaikan kebijakan lokal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini, penulis meninjau beberapa studi terdahulu yang relevan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ketahanan pangan telah diterapkan di berbagai wilayah, serta sebagai upaya untuk mengidentifikasi celah (gap) penelitian yang dapat dijadikan landasan penyusunan studi ini. Penelitian Rahmi dan Jumiati (2020) berjudul *"Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan"*, menggunakan teori Van Meter & Van Horn dan metode deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kendala utama implementasi kebijakan berasal dari keterbatasan sumber daya serta karakteristik lembaga pelaksana. Walaupun memiliki fokus yang sama yaitu ketahanan pangan, penelitian ini lebih menekankan pada dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, tanpa mengulas secara khusus pembinaan kelompok tani sebagai unit pelaksana kebijakan. Selanjutnya, Saheb, Slamet, dan Zuber (2020) dalam penelitiannya *"Implementasi Program Ketahanan Pangan Berbasis Pemberdayaan Petani di Kabupaten Boyolali"*, menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III dengan metode kualitatif deskriptif. Mereka menemukan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komitmen pelaksana, partisipasi aktif petani, serta dukungan anggaran yang memadai. Penelitian ini relevan karena juga menyoroti peran kelompok tani, namun dilakukan di wilayah daratan dengan akses logistik dan distribusi yang relatif lebih mudah dibandingkan daerah kepulauan seperti Halmahera Selatan. Adapun penelitian Arief Bakhtiar Darmawan dkk. (2023) berjudul *"Implementasi Kebijakan SDGs Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas)"* menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini.

mengkaji bagaimana pemerintah desa mengelola ketahanan pangan di masa pandemi dan menghubungkannya dengan pencapaian tujuan kedua SDGs. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang tepat dalam aspek arah kebijakan dan lingkungan, namun belum optimal dari sisi pembelajaran masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks krisis, implementasi kebijakan ketahanan pangan membutuhkan pendekatan partisipatif dan edukatif, meskipun tidak membahas langsung aspek pembinaan kelompok tani hortikultura. Dari tiga studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak dilakukan penelitian terkait implementasi kebijakan ketahanan pangan, belum ada yang secara spesifik mengkaji pembinaan kelompok tani hortikultura sayuran di daerah kepulauan dengan kompleksitas geografis dan ketimpangan distribusi kelompok tani seperti di Kabupaten Halmahera Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjawab celah tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan melalui pendekatan pembinaan kelompok tani sebagai strategi peningkatan ketahanan pangan daerah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (novelty) yang terletak pada pendekatan analisis dan konteks geografis yang belum banyak diungkap dalam studi sebelumnya. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya menyoroti implementasi kebijakan ketahanan pangan dari perspektif makro, pemberdayaan petani secara umum, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini secara spesifik fokus pada implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pembinaan kelompok tani hortikultura sayuran di wilayah kepulauan, yaitu Kabupaten Halmahera Selatan. Kebaruan lainnya terletak pada pemanfaatan teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones yang diaplikasikan dalam konteks organisasi pelaksana di sektor ketahanan pangan lokal. Penelitian ini mengintegrasikan aspek pembinaan kelompok tani sebagai entitas strategis dalam pelaksanaan kebijakan daerah, serta menganalisis faktor-faktor penghambat seperti ketimpangan distribusi kelompok tani, pemanfaatan lahan yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi petani dalam program pembinaan. Studi ini juga menambahkan rekomendasi berbasis kondisi empirik mengenai peningkatan kapasitas kelembagaan, integrasi lintas instansi, dan optimalisasi lahan hortikultura. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur kebijakan publik dalam konteks ketahanan pangan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah, terutama dalam perumusan kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan serta penguatan kelembagaan kelompok tani.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pembinaan kelompok tani sayuran di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data dan informasi yang akan dihimpun tidak bersifat kuantitatif, melainkan akan didasarkan pada hasil wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan, dan dokumen resmi. Menurut Moleong (2013), penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendalami fenomena yang muncul pada subjek penelitian, seperti pemahaman, perilaku, dan motivasi,

baik secara komprehensif maupun melalui deskripsi menggunakan bahasa dan kata-kata. Penelitian ini dilakukan dalam konteks yang alamiah dan menerapkan metode penelitian yang bersifat alamiah. Creswell (2016) menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami pandangan banyak individu atau kelompok tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah sosial atau kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif melibatkan sejumlah langkah penting, seperti, merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data dari informasi yang sangat spesifik hingga yang lebih umum dan menganalisis dan menafsirkan makna data yang diperoleh. Salah satu aspek yang memiliki signifikansi dalam penelitian adalah metode pengumpulan data. Kualitas dan kelengkapan data yang berhasil terkumpul dapat menjadi penentu keberhasilan suatu penelitian. Sebaliknya, ketika peneliti tidak berhasil mengumpulkan data yang esensial, penelitian tersebut berpotensi tidak mencapai tujuan yang diinginkan dan dinilai kurang berhasil. Menurut Nazir (2017), pengumpulan data adalah tahap sistematis yang harus mengikuti standar tertentu guna memperoleh data yang menjadi kebutuhan peneliti.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi. Menurut Mulyadi (2014), observasi adalah tindakan mengamati atau memperhatikan peristiwa yang dapat dijadikan sebagai data untuk memberikan penjelasan terkait dengan apa yang diamati. Sugiyono (2016) mendefinisikan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan respons individu, peneliti akan secara langsung mengamati situasi di lapangan. lalu Teknik wawancara Menurut Estenberg dalam Sugiyono (2017), wawancara adalah pertemuan antara dua individu untuk menganalisis, menukar informasi, gagasan, dan pandangan melalui serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan suatu topik dan juga dokumentasi Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi merujuk pada metode penggalian data dalam berbagai bentuk seperti buku, arsip, dokumen, catatan angka, serta gambar. Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif yang menurut Nurdin dan Hartati (2018) merupakan suatu teknik analisis yang dipakai untuk mengetahui dan menggambarkan data-data yang terkumpul dari hasil pengamatan tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Menurut Sugiyono (2015), analisis data adalah proses yang dimulai dari pencarian hingga pengorganisasian data secara sistematis dan berurutan. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Setelah itu, data dikelompokkan ke dalam kategori atau kelompok berdasarkan relevansinya. Dalam proses analisis data, peneliti mengacu pada kerangka analisis data Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pembinaan kelompok tani sayuran di Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan teori dari Charles O. Jones (1996) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat terlaksana pada tiga dimensi diantaranya organisasi, interpretasi dan juga aplikasi.

3.1 Organisasi

Dimensi organisasi, khususnya sumber daya manusia, memiliki peran krusial dalam proses pembinaan kelompok tani dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan, kompetensinya sudah memadai. Namun, keterbatasan jumlah penyuluh menjadi tantangan tersendiri, ditambah dengan petani yang masih kurang mandiri dalam beradaptasi dengan tanaman hortikultura. Selain itu, sarana dan prasarana yang

disediakan untuk mendukung kegiatan tersebut belum merata akibat keterbatasan anggaran dan biaya operasional.

3.2 Interpretasi

Interpretasi merupakan dimensi kedua yaitu proses penafsiran program menjadi rencana dan tindakan yang dapat diterima dan dilaksanakan. Proses interpretasi melibatkan aktivitas komunikasi, sosialisasi, dan koordinasi antar pelaksana kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012) menekankan bahwa interpretasi yang tepat akan mempengaruhi pemahaman pelaksana dan target kebijakan terhadap tujuan dan substansi program.

Pemerintah, melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan telah mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, komunikasi antara pelaksana dan petani masih menjadi kendala, karena tidak semua petani memahami bahwa proses pembinaan dilakukan secara kelompok melalui pembentukan kelompok tani, bukan secara individu. Akibatnya, masih ada petani yang kesulitan beradaptasi dengan sistem pertanian hortikultura.

3.3 Aplikasi

Implementasi kebijakan ini telah dijalankan sesuai dengan prosedur, program kerja, dan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, masih ada beberapa kendala, baik di sisi pemerintah maupun petani. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan petani dalam beradaptasi dari pertanian rempah-rempah ke hortikultura. Akibatnya, sebagian besar lahan masih digunakan untuk menanam rempah-rempah, dan pola pertanian yang diterapkan lebih bersifat individu daripada berbasis kelompok, sehingga lahan untuk hortikultura menjadi terbatas. Selain itu, jadwal pembinaan dan pendampingan masih minim karena jumlah penyuluh pertanian yang terbatas

3.4 Faktor Penghambat

Implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pembinaan kelompok tani sayuran di Kabupaten Halmahera Selatan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar. Kendala internal yang dihadapi meliputi:

1. Petani masih kesulitan beradaptasi dengan pertanian hortikultura karena terbiasa menanam rempah-rempah yang membutuhkan perawatan lebih sederhana. Selain itu, kurangnya konsistensi, pengetahuan, serta masih dominannya penggunaan alat pertanian tradisional membuat proses produksi menjadi kurang efisien.
2. Terbatasnya anggaran dan biaya operasional berdampak pada minimnya bantuan sarana dan prasarana, serta menghambat kegiatan pembinaan yang seharusnya diberikan kepada kelompok tani.
3. Jumlah tenaga penyuluh pertanian lapangan masih sangat terbatas, sehingga bimbingan bagi petani tidak dapat dilakukan secara optimal.

Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat eksternal, seperti:

1. Terbatasnya lahan pertanian di Kabupaten Halmahera Selatan karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah kepulauan, terdapat banyak tambang, lahan pertanian lebih banyak digunakan hanya untuk tanaman tahunan serta banyaknya pembukaan pemukiman baru sehingga lahan yang tersedia untuk pertanian semakin berkurang.
2. Cuaca yang tidak menentu serta kendala pasokan air, terutama saat musim kemarau, membuat petani kesulitan mendapatkan air untuk irigasi. Hal ini

diperparah dengan ketiadaan sumber mata air yang memadai di wilayah tersebut, sehingga menyulitkan kegiatan pertanian.

3.5 Upaya Mengatasi Faktor Penhambat

Untuk mengatasi berbagai hambatan internal, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah mengidentifikasi beberapa langkah strategis, di antaranya:.

1. Melakukan pembinaan secara intensif kepada petani dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka, serta menambah frekuensi kegiatan pembinaan agar proses adaptasi ke pertanian hortikultura khususnya sayuran dapat berjalan lebih cepat.
2. Menambah jumlah penyuluh pertanian yang berkompeten untuk memperlancar proses pembinaan dan pendampingan bagi kelompok tani.

Untuk mengatasi hambatan eksternal, langkah-langkah yang diambil meliputi:

1. Pemerintah berupaya memperluas lahan pertanian di setiap kecamatan yang memiliki kelompok tani dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan lahan kosong atau lahan marginal agar dapat dioptimalkan menjadi lahan pertanian yang produktif.
2. Untuk mengatasi cuaca yang tidak menentu, pemerintah menyediakan tandon air sebagai penampung air hujan yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan PDAM untuk memperluas jaringan distribusi air ke lahan pertanian guna memastikan ketersediaan air irigasi yang stabil, mengingat Kabupaten Halmahera Selatan belum mempunyai sumber mata air yang memadai.

IV. KESIMPULAN

Hasil daripada implementasi kebijakan pembinaan kelompok tani sayuran di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu peneliti menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Pembinaan Kelompok Tani Sayuran di Kabupaten Halmahera Selatan belum dilaksanakan dengan baik dan masih terdapat hambatan atau kendala dilapangan yang perlu diperbaharui, dengan melakukan analisis dengan teori Implementasi Jones (1996) yang didalamnya terdapat 3 dimensi, organisasi, interpretasi dan aplikasi. Pada pengimplementasiannya pemerintah telah melaksanakan pembinaan kepada akan tetapi masih terdapat kendala dari beberapa indikator di tiap dimensinya. Implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pembinaan kelompok tani sayuran di Kabupaten Halmahera Selatan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar. Kendala internal yang dihadapi meliputi. tantangan internal dan eksternal menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pembinaan kelompok tani, termasuk kesulitan petani beradaptasi dengan pertanian hortikultura, keterbatasan anggaran dan lahan, cuaca yang tidak menentu, serta keterbatasan sumber daya air dan untuk mengatasi berbagai hambatan internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah mengidentifikasi beberapa langkah strategis, di antaranya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah mengupayakan berbagai solusi strategis, seperti intensifikasi pembinaan, penambahan penyuluh pertanian, pemanfaatan lahan marginal, dan penyediaan infrastruktur irigasi (tandon air dan distribusi air), guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ketahanan pangan berbasis kelompok tani.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan berfokus pada dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Kebijakan Charles O.Jones (1996).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program pelatihan penempatan kerja untuk menemukan hasil yang lebih mendalam serta memberikan saran dan inovasi yang terbaik

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada Allah SWT yang masih memberikan kehidupan dan juga umur yang Panjang serta perlindungan kepada penulis, kepada orang tua penulis, Ibu Ayah yang selalu mendoakan serta mendukung penulis, kepada Dosen Pembimbing Bapak Mulyana S.E., M.Si yang selalu memberi dedikasi dalam hal mengajar penulis, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arief Bakhtiar Darmawan dkk. (2023) Implementasi Kebijakan SDGs Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas)
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Istamto. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Publica Institute
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nurdin, Ismail & Sri Hartati. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Nuryanti, Sri & Dewa K.S. Swastika. 2016. *Peran Kelompok Tani dalam Penerapan Teknologi Pertanian*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 29(2): 115-128.
- Rahmi, Nur & Jumiati. 2020. *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Administrasi Negara, 26(1): 1-15

Saheb, Slamet Y. & Ahmad Zuber. 2020. *Implementasi Program Ketahanan Pangan Berbasis Pemberdayaan Petani di Kabupaten Boyolali*. Jurnal Sosiologi DILEMA, 33(2): 37-46.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta Nabila,

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

